

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Gambaran Kabupaten Wonogiri

Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang seringkali disebut Kota Gaplek karena kondisi alamnya yang didominasi oleh pegunungan yang berbatu gamping atau tanah kapur. Dengan kondisi alamnya ini, membuat produksi padi kurang cocok untuk dilakukan di beberapa wilayahnya disebabkan karena adanya keterbatasan sumber air. Untuk itu, sebagai alternatif para petani di Wonogiri lebih memfokuskan pada tanaman singkong, dari singkong ini produksi yang paling terkenal dari Wonogiri adalah tepung gaplek, sehingga disebutlah sebagai kota gaplek.

Wonogiri ini terletak diantara 2 provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur sehingga lokasinya sangat strategis. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi di Jawa Tengah dengan panjang garis pantainya 7,6 km. Dengan daerah kabupaten yang cukup luas, daerah ini memiliki jumlah penduduk 1.043.576 Jiwa, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun saat ini peminat untuk bekerja sebagai petani mulai menurun, yang disebabkan karena gengsi dan karena alasan penghasilan yang dinilai kurang bagi mereka. Sehingga saat ini banyak warga Wonogiri yang lebih memilih untuk bekerja di luar daerah dengan harapan mendapat penghasilan yang lebih besar.

1.2 Gambaran Kaum Boro

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya yang bisa dikelola untuk menciptakan lapangan pekerjaan lokal, salah satunya di Kabupaten Wonogiri. Hal ini yang menyebabkan banyak warga masyarakat di kabupaten ini memilih untuk merantau ke berbagai daerah. Pembangunan yang kurang merata dan sering kali hanya terfokus pada kota-kota besar menyebabkan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi di daerah pinggiran menjadi sangat terbatas sehingga kondisi ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk merantau daripada harus mencari pekerjaan di daerah sendiri.

Menurut data dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, jumlah perantau atau yang biasa disebut sebagai *kaum boro* ini mencapai 35 persen penduduk atau 350.000 orang dari 1 juta penduduk. Aktivitas merantau sendiri sudah menjadi hal biasa di Wonogiri, sebab dari bertahun-tahun yang lalu sudah banyak warga yang memilih untuk merantau daripada bekerja di kampung halaman sendiri. Hal ini diawali karena sejak dulu Kabupaten Wonogiri memang bukanlah pusat perniagaan yang aktif atau tidak banyak tempat yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Tidak banyak industri serta sektor ekonomi yang berkembang akhirnya banyak warga Wonogiri yang harus mencari nafkah ke daerah lain.

Solo, sebagai kota terdekat dengan Wonogiri menjadi tujuan pertama warga yang merantau untuk dapat memulai bekerja atau membuka usaha karena dahulu Solo memang sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan pasca kemerdekaan barulah Jakarta

muncul sebagai destinasi penting bagi para pekerja karena menawarkan lebih banyak peluang ekonomi bagi *kaum boro*.

Di Perantauan ini, banyak warga yang memilih untuk berdagang mie ayam dan bakso hingga akhirnya sampai saat ini menjadi jenis usaha yang sudah menjadi ikon bagi para *kaum boro* atau perantau asal Wonogiri. Menurut Eddy Santoso selaku ketua paguyuban Mie Ayam Tunggal Rasa Wonogiri dalam sebuah wawancara mengungkapkan bahwa dalam keluarga penjual mie ayam, biasanya istri turut menjalankan usaha lain seperti berjualan jamu. Hal ini yang menunjukkan semangat dan adaptasi yang tinggi dari para perantau Wonogiri dalam mengembangkan usaha dan menambah sumber pendapatan bagi keluarga mereka.

Tradisi merantau ini sering kali diwariskan turun-temurun, perantau yang sukses dengan bisnis mie ayam dan baksonya di kota perantauan biasanya mengajak saudara mereka untuk ikut serta dalam usaha tersebut, selain untuk membantu mengurus usaha mereka juga belajar keterampilan berdagang. Seiring dengan perkembangan usahanya bahkan mereka juga turut mengajak tetangganya untuk ikut merantau dan menjalankan usaha serupa. Hal ini dilakukan guna menciptakan jaringan ekonomi baru dan solidaritas yang kuat di antara komunitas perantau Wonogiri, sehingga mereka bisa saling mendukung dan memperbesar usaha mereka di daerah rantau. Hingga saat ini sudah banyak tersebar tempat makan mie ayam dan bakso yang berasal dari Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri saat ini telah mengalami banyak perubahan sejak era generasi para perantau. Dulu, anak-anak muda dari Wonogiri terpaksa merantau karena minimnya lapangan pekerjaan di kampung halaman mereka. Namun

seiring berjalannya waktu, kondisi mulai berubah dimana industri yang dulunya terpusat di daerah Solo dan Sukoharjo kini mulai merambah ke Wonogiri. Pabrik-pabrik garmen kini mulai tersebar di Wonogiri sehingga memberikan prospek baru bagi para generasi muda untuk bisa bekerja dengan tetap menetap di daerah asal tanpa harus pergi merantau.

Meskipun saat ini peluang untuk hidup dan bekerja di daerah sendiri semakin terbuka, namun masih terdapat masalah yang menjadi pertimbangan warga untuk tetap memilih merantau. Salah satu tantangan utamanya adalah tingkat upah minimum regional (UMR) yang relatif rendah. Kabupaten Wonogiri saat ini menduduki peringkat kedua dengan UMR terendah di Jawa Tengah, hal ini yang membuat sebagian besar warganya masih memilih untuk mencari nafkah di daerah lain yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Selisih pendapatan dianggap sebagai faktor pendorong yang kuat bagi para perantau untuk bertahan lama di daerah perantauan. Bagi mereka, merantau masih menjadi pilihan yang menjanjikan untuk mengejar kesejahteraan ekonomi mereka. Sehingga siklus migrasi ini masih berlanjut hingga sekarang, dengan *kaum boro* Wonogiri yang tetap memadati kota-kota besar dengan berbagai usaha mereka.

1.3 Gambaran PILKADA Tahun 2020

Tahun 2020 menjadi tahun pesta demokrasi yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebab di tahun itu, Pilkada dilaksanakan ditengah ancaman virus Corona. Hingga pemerintah menetapkan sebagai pandemi covid yang dimulai sejak tahun 2019. Akibatnya, penyelenggaraan Pilkada 2020 ini dianggap menjadi ajang paling berat dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia.

Namun, di tengah ancaman pandemi ini justru Kabupaten Wonogiri memberikan catatan baru dalam Pilkada, sebab di tahun 2020 menjadi tahun ketika tingkat partisipasi pemilihnya justru tercatat sebagai partisipasi tertinggi dalam Pilkada di Wonogiri yaitu mencapai 71,5%. Meskipun pencapaian ini masih berada di bawah target partisipasi nasional yang ditetapkan sebesar 77,5%. Tingkat partisipasi dalam Pilkada di kabupaten Wonogiri ditahun-tahun sebelumnya tidak pernah menyentuh 70%.

Sebelum pelaksanaan Pilkada serentak ini, Joko Sutopo selaku Bupati Wonogiri sempat tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada karena dinilai akan memberi dampak negatif. Bupati Wonogiri itu tampak tidak yakin negara siap menghadapi resiko yang mungkin terjadi apabila memaksakan Pilkada tetap dilaksanakan di tengah Pandemi. Kekhawatirannya bukan hanya dalam hal bagaimana pelaksanaan Pilkada nantinya, namun juga dalam hal partisipasi yang mungkin rendah. Dia menilai masyarakat akan cenderung takut untuk memberikan suara di tengah pandemi yang sedang terjadi karena takut tertular ketika datang ke TPS. Dia lebih setuju apabila Pilkada dilakukan pada akhir tahun 2021 namun dengan catatan pandemi sudah berakhir.

Namun, akhirnya Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya anggapan bahwa Pilkada perlu tetap dilakukan agar pemerintahan di daerah tetap berjalan optimal. Apabila pemimpin daerah sudah habis masa jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) atau pejabat pelaksana harian (plh) sampai pelaksanaan Pilkada selanjutnya yang belum diketahui kepastiannya akibat

pandemi, maka akan cenderung pelaksanaannya tidak maksimal dan bisa saja menimbulkan masalah lain.

1.4 Peran Kaum Boro dalam PILKADA

Meningkatnya jumlah partisipasi dalam PILKADA tahun 2020 di kabupaten Wonogiri menjadi bukti kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui pemilihan pemimpin daerah yang baru. Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi mengapresiasi khususnya kepada para perantau yang kembali ke kampung halaman demi menyalurkan hak suaranya dalam PILKADA di Tahun 2020. Apresiasi tepat diberikan bagi para perantau yang tetap ingin terlibat dalam proses demokrasi, meskipun mereka sehari-harinya tinggal dan bekerja di daerah lain.

Tingginya partisipasi *kaum boro* dalam PILKADA ini salah satunya disebabkan karena disaat itu kasus jumlah positif covid-19 sedang tinggi dan di daerah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak dari pemberlakuan PSBB ini membuat banyak warga perantau khususnya warga Wonogiri memilih untuk pulang kampung. Hal ini juga dikarenakan banyak dari warga Wonogiri yang merantau di daerah JABODETABEK sehingga saat itu banyak yang pulang ke Wonogiri.

Walaupun tingginya partisipasi dari *kaum boro* ini disebabkan adanya pembatasan di tempat perantauan mereka, namun di pemilihan ini dengan adanya partisipasi dari mereka membawa dampak tidak langsung bagi pelaksanaan Pilkada. Sebab, dengan membawa aspirasi dan perspektif dari luar daerah dapat

memberi warna baru pada pemilihan. Pengalaman mereka di tempat perantauan bisa mempengaruhi pilihan mereka, misalnya dengan mereka memilih kandidat yang dianggap mampu memajukan daerah sendiri dan meningkatkan kesejahteraan warga serta dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi warganya agar kedepannya banyak warga yang merasa tidak perlu lagi merantau demi kehidupan yang lebih baik.

Peran *kaum boro* semakin terasa karena mereka secara tidak langsung membangkitkan semangat warga desa untuk ikut memberikan hak suaranya. Sebab bagi warga pedesaan *kaum boro* seringkali dianggap sebagai contoh sukses, sehingga keterlibatan mereka dalam Pilkada bisa memberi dorongan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, *kaum boro* bukan hanya sebagai pemilih saja, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara Wonogiri dengan pengalaman dari luar daerah. Mereka mendorong masyarakat untuk aktif dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, mereka akan sangat senang menceritakan hal-hal baik dari kota perantauannya kepada keluarga bahkan tetangganya sehingga hal ini akan membantu merubah pemikiran warga untuk dapat memilih pemimpin daerah yang lebih baik.